



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK-RI)
UNIT KERJA : BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ERWANSYAH NASRUL FUAD
2. Jabatan : KEPALA SUBAUDITORAT
3. NHK : 240861

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 928.525.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 108 m²/100 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 260.208.000
2. Tanah Seluas 108 m² di KAB / KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 235.008.000
3. Tanah Seluas 187 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 214.489.000
4. Tanah Seluas 60 m² di KAB / KOTA KOTA TANGERANG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 68.820.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m²/100 m² di KAB / KOTA SUKOHARJO, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 367.000.000

1. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 27.000.000
3. MOBIL, HONDA JAZZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 888.771.223**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 2.221.296.223



III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.221.296.223

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.